

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM  
MENGATASI ABRASI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**ROBBY RIFKY AMORA**

**NPM : 147310198**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **Peranan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti** ”.

Penyusunan usulan penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penyusunan dapat dilaksanakan dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Prof.Dr.H. Yusri Munaf,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
4. Bapak Syaprianto, S.Ip M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan serta karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Orang tua tercinta yaitu bapak Suhaimi dan ibu Kamisah yang selalu memberikan semangat serta doanya kepada saya, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.
7. Kakak saya Wahyu Fitria serta Teman-teman Ilmu Pemerintahan lokal C angkatan 2014 yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar sarjana.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

ROBBY RIFKY AMORA

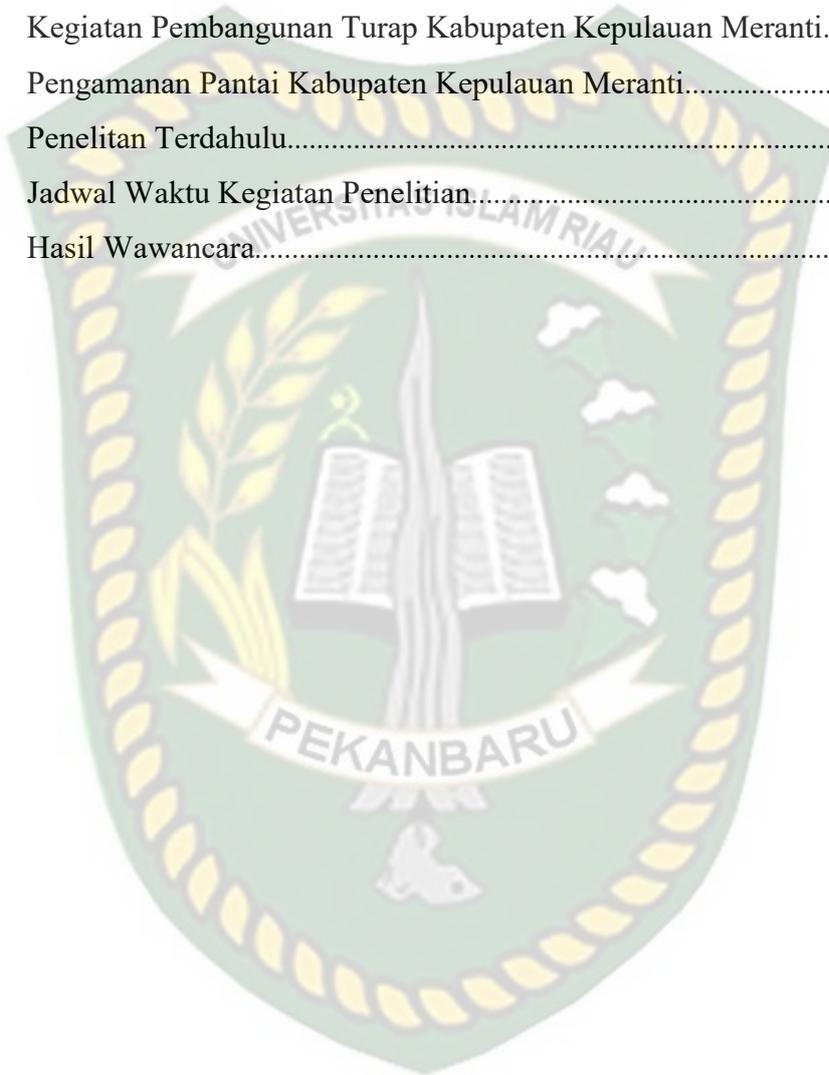
## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintahan.....	18
2. Konsep Kebijakan.....	20
3. Konsep Kebijakan Publik.....	21
4. Konsep Peranan.....	22
5. Abrasi.....	24
6. Pembangunan.....	25
7. Pengelolaan.....	26
8. Pengendalian.....	27
9. Pemeliharaan.....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Kerangka Pikiran.....	30
D. Konsep Operasional.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Responden Penelitian.....	32
D. Teknik Penarikan Informan.....	33

E. Jenis dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisa Data.....	34
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	36
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti.....	37
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti .....	43
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden.....	57
B. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mengatasi Abrasi.....	59
C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Mengatasi Abrasi.....	77
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	83

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Pengamanan Pantai Kabupaten Kepulauan Meranti.....	13
1.2 Kegiatan Pembangunan Turap Kabupaten Kepulauan Meranti.....	14
1.3 Pengamanan Pantai Kabupaten Kepulauan Meranti.....	16
1.4 Penelitian Terdahulu.....	28
1.5 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	36
1.6 Hasil Wawancara.....	36



**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Kerangka Pikir Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi .....	28



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Rifky Amora  
NPM : 147310198  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau  
Dalam Mengatasi Abrasi di Kabupaten Kepulauan  
Meranti

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan pemulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan komprehensif yang telah ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Juni 2021

Pernyataan

Robby Rifky Amora

**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM MENGATASI ABRASI  
DIKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**ABSTRAK**

**OLEH**

**ROBBY RIFKY AMORA**

Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir yang dapat juga mengancam garis pantai sehingga mundur kebelakang yang mengakibatkan daratan makin terkikis dan lautan makin meluas, tentu hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat khususnya yang tinggal ditepi pantai. Karena akibat dari abrasi ini membuat hilangnya lahan pertanian, kebun-kebun masyarakat, dan juga jalan umum jika hal ini terus terjadi maka tidak dipungkiri akan tenggelamnya sebuah pulau, hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Dikabupaten Kepulauan Meranti dan sekaligus mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Dikabupaten Kepulauan Meranti, Dalam penelitian ini yang menjadi keyformen adalah kepala seksi pembangunan sarana pengairan, staff bidang subrtansi bagian umum dan kepala badan pengelola perbatasan sedangkan informen dari penelitian ini adalah masyarakat. Adapun jenis dan sumber data adalah primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengambilan data dan hasil wawancara dan selanjutnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data deskriptif dengan tipe penelitian adalah observasi yaitu kegiatan mendapatkan informasi yang disimpulkan untuk menyajikan gambaran secara rill. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Dikabupaten Kepulauan Meranti ini masih perlu ditingkatkan lagi mengingat beberapa daerah yang telah dibangun tanggul ataupun turap sebagai penahan abrasi masih belum merata.

*Kata kunci : Peranan, Dinas Pekerjaan Umum, Abrasi dan Kabupaten Kepulauan Meranti*

**ROLE OF THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS IN OVERCOMING  
ABRASION MERANTI ISLANDS DISTRICT**

**ABSTRACT**

**BY**

**ROBBY RIFKY AMORA**

Abrasion is one of the problems that threaten coastal conditions that can also threaten coastlines that moved backward resulting in land increasingly eroded and oceans increasingly widespread, of course that is extremely dangerous for people, especially living on the coast as a result of abrasion makes the loss of agricultural land, community gardens, as well as public roads if it continues to happen then it will no doubt be sinking as island that is what should be the government's attention, the subject matter of this research is how the job role of the Department of Public to Adress the county Abrasion Meranti Islands and acknowledging constraints barriers experienced anything what the study, the keyformen is section head of the construction of irrigation facilities, staff areas of substance common parts and the head of border services while informen of this research is society. As for the type and source of the data is primary and which is secondary data obtained from respondents through data collection and interviews and further research is using qualitative method and descriptive data by type of research is the observation of activities to get the necessary information to present the real picture. From these results it can be concluded that the role of the Department of Public Works in the county speak against abrasion Meranti Island is still room for improvement remember some areas that have been built as a retaining dike or plaster abrasion is still not evenly distributed.

*Keywords* : *Role, Department of Public Works, Abrasion and Meranti Islands District*



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Rifky Amora  
NPM : 147310198  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau  
Dalam Mengatasi Abrasi di Kabupaten Kepulauan  
Meranti

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepad kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan pemulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan komprehensif yang telah ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 04 Juni 2021

Pernyataan

*Robby Rifky Amora*  
Robby Rifky Amora

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya tidak lepas dengan garis pantai, Indonesia sendiri memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Kanada, Amerika Serikat dan Rusia, garis pantai Indonesia sendiri sepanjang 95.181 kilometer. Namun sebanyak 20 persen dari garis pantai di sepanjang wilayah Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan, tentunya kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan lingkungan dan abrasi pantai.

Abrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak yang dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.

Air laut tidak pernah diam. Air laut bergelombang di permukaannya, kadang-kadang besar kadang-kadang kecil, tergantung pada kecepatan angin dan kedalaman dasar lautnya. Semakin dalam dasar lautnya makin besar gelombangnya. Gelombang mempunyai kemampuan untuk mengikis pantai. Tetapi kerusakan atau kerugian yang diakibatkan abrasi bisa diperkecil dengan cara tetap menjaga kelestarian hutan mangrove di sekitar pantai.

Kondisi kawasan pantai di berbagai lokasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan yang diakibatkan oleh adanya kejadian abrasi. Sekitar 100 2

lokasi di 17 provinsi dengan panjang pantai kurang lebih 400 km telah mengalami erosi pantai yang mengkhawatirkan. Tidak terkecuali di provinsi Riau dimana terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki garis pantai serta menjadi pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Kabupaten Kepulauan Meranti contohnya yang sebelah utara berbatasan langsung dengan selat Malaka yang merupakan jalur lintas angkutan laut berbagai negara.

Dalam pelaksanaannya, penanganan masalah abrasi pantai dan gelombang ekstrim dapat melibatkan berbagai kepentingan, nilai serta pemahaman pola penanganannya. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dengan melibatkan pertimbangan biaya, operasional dan pemeliharaan. Selain kerjasama, pembagian kewenangan penanganan abrasi dan gelombang ekstrim di daerah pantai juga harus jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pada masing-masing satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pengendalian abrasi.

Dari tahun ke tahun wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama yang berhadapan langsung dengan selat Malaka yang memiliki karakteristik gelombang laut yang cukup kuat. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, menyebut bahwa abrasi di wilayah pesisir Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti itu rata-rata mencapai 15 meter per tahun.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam Pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dinas pekerjaan umum termasuk sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang terbagi atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Melihat pengertian ini, bahwa urusan Konkuren adalah urusan-urusan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetapi susai dengan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Wilayah Negara Republik Indonesia yang 7,4 juta km<sup>2</sup>, sebagian besar berupa perairan wilayah laut yang mencakup luas lebih-kurang 5,5 juta km<sup>2</sup>. Wilayah laut ini jauh lebih luas daripada wilayah daratan yang luasnya sedikit lebih dari 1,9 juta km<sup>2</sup>. Diantara daerah-daerah kelautan ini sebagian besar berupa teluk-teluk dan selat-selat yang seakan-akan mengikat ribuan pulau-pulau besar dan kecil menjadi suatu kesatuan kepulauan yang hanya dapat dimasuki melalui selat-selat tertentu. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 25A mengatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”..

Berbicara mengenai Negara Indonesia adalah negara kepulauan, bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang dari tahun ke tahun mengalami abrasi dan kerusakan yang cukup parah terutama yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang memiliki gelombang laut yang cukup kuat. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk satu dari lima kawasan prioritas perbatasan laut RI Singapura/Malaysia/Vietnam yang terdapat di Provinsi Riau, selain Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir. Kondisi geografis yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan Internasional Selat Malaka dan berbatasan dengan dua Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura memberikan peluang dan ancaman dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan hadirnya undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah ini maka telah memberikan harapan besar bagi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi di setiap daerah.

Salah satu daerah otonomi adalah Provinsi Riau dengan luas wilayah 88.672,67km<sup>2</sup>, jumlah Kabupaten 10, Kota 2 dan jumlah Kecamatan 163 serta Kelurahan 241. Salah satu urusan yang disebutkan daerah Provinsi Riau adalah pekerjaan umum, terkait dengan luas kabupaten maka pemerintahan daerah provinsi telah menetapkan beberapa tugas dan wewenang dinas pekerjaan umum berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau bagian keempat Bidang

Sumber Daya Air pasal 20 yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dalam pencegahan Abrasi yaitu :

- (1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan perencanaan teknis irigasi, rawa, sungai, pantai, danau, air baku dan waduk;
  - b. Pengelolaan Hidrologi dan Hidrometri;
  - c. Melaksanakan piñata usahaan Bidang Sumber Daya Air;
  - d. Pemprosesan pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan Bidang Sumber Daya Air dan penentuan peil banjir;
  - e. Melaksanakan pengendalian dan penguatan kelembagaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
  - f. Melaksanakan kerja sama lintas sektor dalam bidang Sumber Daya Air;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Kepala seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas :
  - a. Pengembangan sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
  - b. Pengelolaan irigasi dan rawa;
  - c. Pembangunan irigasi dan rawa;
  - d. Peningkatan irigasi dan rawa;
  - e. Perbaikan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
  - f. Pemantauan dan evaluasi kondisi dan fungsi terhadap sarana dan prasarana daerah irigasi dan rawa;
  - g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam pada daerah irigasi dan daerah rawa;
  - h. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Sungai, Pantai, dan Danau mempunyai tugas :
  - a. Konservasi Bidang Sumber Daya Air;
  - b. Pengelolaan, pembangunan, peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan sungai, danau, pantai, air baku, waduk;
  - c. Pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, abrasi, erosi pada sungai, pantai dan waduk;
  - d. Penanganan dan penanggulangan bencana alam pada sungai, pantai, danau dan waduk daerah irigasi dan daerah rawa;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Maka dari itu berdasarkan tugas dan fungsi diatas, kewenangan dalam masalah atau urusan abrasi merupakan wewenang dari Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Riau berdasarkan luas wilayah abrasi dan anggaran yang diperoleh oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selanjutnya didalam pembagian tugas dan wewenang daerah Kabupaten terdapat dasar hukum yang menjadi aturan bagi daerah kabupaten yang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti. Bagian keenam Bidang Perairan pasal 20 dalam mengatasi abrasi yaitu :

- (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dibidang Pembangunan sarana pengairan, pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian dan pemeliharaan sarana pengairan.
- (2) Bidang Pengairan dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengumpulan dan penganalisaan data pengairan;
  - b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis pembangunan sarana pengairan, pengelolaan sumber daya air dan pengendalian serta pemeliharaan sarana pengairan;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pengairan yang meliputi pembangunan sarana pengairan, pengelolaan sumber daya air dan pengendalian dan pemeliharaan sarana pengairan;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengairan;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
    - (1) Susunan Organisasi Bidang Pengairan, terdiri dari :
      - a. Seksi Pembangunan Sarana Pengairan;
      - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
      - c. Seksi Pengendalian Sarana Pengairan.

Dalam penanggulangan abrasi ini kabupaten kepulauan meranti saling kerja sama dan saling koordinasi dengan provinsi dikarenakan kabupaten

kepulauan meranti membutuhkan dana triliunan rupiah untuk mengatasi abrasi berat tengah melanda sejumlah pulau di daerah tersebut. Kebutuhan dana sebesar itu tidak mampu ditanggung Pemkab Meranti, harus didukung sumber anggaran provinsi dan pusat.

Setiap tahunnya sejumlah wilayah di Meranti terutama Pulau Rangsang dan Pulau Merbau mengalami pengikisan sekitar dua sampai tiga meter. Jika dikalkulasi selama sepuluh tahun, daratan di dua pulau tersebut terkikis sekitar 30 meter, sangat memprihatinkan dan tidak menutup kemungkinan abrasi akan semakin deras mengingat upaya untuk menahan terjangan abrasi belum optimal.

Masalah abrasi pantai di Meranti sudah menjadi permasalahan klasik tak kunjung tuntas mengingat minimnya perhatian dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi masalah ini anggaran yang dibutuhkan sangat besar mencapai triliunan rupiah, masih harus menunggu bantuan dana dari pemerintah provinsi dan pusat. Besarnya anggaran yang dibutuhkan disebabkan wilayah Kabupaten Meranti terdiri dari berbagai pulau-pulau kecil yang rata-rata rentan abrasi berat.

Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 desember 2008, Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat

Meranti maka pada tanggal 25 juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Prihal dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Adapun nama kecamatan, luas, dan jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas 849,50km<sup>2</sup> Jumlah penduduk 63.942 jiwa
2. Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan luas 586,83km<sup>2</sup> Jumlah Penduduk 15.126 jiwa
3. Kecamatan Rangsang dengan luas 681,00km<sup>2</sup> Jumlah penduduk 28.106 jiwa

4. Kecamatan Rangsang Barat dengan luas 241,60km<sup>2</sup> Jumlah penduduk 29.770 jiwa
5. Kecamatan Merbau dengan luas 1.348,91km<sup>2</sup> Jumlah Penduduk 47.370 jiwa
6. Kecamatan Pulau Merbau dengan luas 380,4km<sup>2</sup> Jumlah Penduduk 14.975 jiwa
7. Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan luas 804,06km<sup>2</sup> Jumlah Penduduk 11.733 jiwa
8. Kecamatan Putri Puyu dengan luas 847,540km<sup>2</sup> Jumlah Penduduk 16.327 jiwa
9. Kecamatan Rangsang Pesisir dengan luas 371,140km<sup>2</sup> Jumlah Penduduk 16.971 jiwa.

Kabupaten Kepulauan Meranti salah satu Kabupaten dipropinsi Riau yang merupakan hasil Pemekaran Kabupaten Kepulauan Bengkalis berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009, Tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdiri dari 4 pulau besar yaitu Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Tebing Tinggi dan Pulau Rangsang serta pulau kecil lainnya yaitu Pulau Topang, Pulau Menggung, Pulau Jadi dan Pulau Panjang yang terbagi dalam 9 (Sembilan) kecamatan sebelah barat dengan Kabupaten Bengkalis dan Siak, sebelah timur dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sebelah selatan dengan Kabupaten Pelalawan (Pulau Sumatera) dan sebelah utara dengan selat Malaka/Malaysia,

Hal ini dapat dilihat dari Luas seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 5.526,17 km<sup>2</sup> terdiri dari luas daratan 3.707,84 km<sup>2</sup> dan luas

lautan 1.818,33 km<sup>2</sup> yang memiliki batas wilayah administrative sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Selat Melaka dan Kabupaten Bengkalis.
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Barat : Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.
4. Sebelah Timur : Selat Melaka.

Daerah yang langsung berbatasan dengan Selat Melaka merupakan daerah yang telah terkena abrasi, terdapat banyak titik lokasi abrasi pantai yang tersebar di beberapa pulau di Kabupaten Meranti. Kondisi abrasi terparah adalah pulau yang langsung berhadapan dengan selat Melaka yaitu Pulau Rangsang dan Pulau Merbau. Laju abrasi dalam satu tahun dapat mencapai 8 meter s/d 12 meter pertahun. Panjang kawasan abrasi:

1. Pulau Rangsang sepanjang 95 km merupakan kawasan pulau terparah terkena bencana abrasi pantai. Desa terkena abrasi pantai terparah Desa Tanah Merah, Desa Telesung, Desa Tanjung Kedabu yang berada di Kecamatan Rangsang Pesisir. Desa terkena abrasi pantai di Kecamatan Rangsang adalah Desa Sungai Gayung, Desa Tanjung Medang, Pulau Menggung dan Pulau Topang.
2. Kecamatan Pulau Merbau sepanjang 8 km, desa terkena abrasi di Kecamatan Pulau Merbau adalah Desa Centai, dan Desa Tanjung Bunga.
3. Kecamatan Tebing Tinggi Barat sepanjang 44 km.
4. Kecamatan Tebing Tinggi Timur sepanjang 29 km.
5. Kecamatan Merbau sepanjang 14 km.

Mengenai prioritas penanganan konsultan merekomendasikan untuk memprioritaskan breakwater di lokasi dengan jarak antara pantai dan fasilitas publik yang terdekat. Sehingga urutan pembangunan yang direkomendasikan adalah :

- a. Pemecah gelombang Pantai Tanjung Motong, Bantar dan Pantai Anak Setatah
- b. Pemecah gelombang Pantai Kedabu Rapat, Tanah Merah, Sonde, dan Telusung
- c. Pemecah gelombang Pantai Ladang Kecil, Tanjung Kedabu, Gayung Kiri, dan Tanjung Medang
- d. Pemecah gelombang Pantai Kuala Merbau, Centai, & Tanjung Bunga
- e. Pemecah gelombang Pantai Bandul, Mengkopot, Mengkirau, dan Teluk Belitung
- f. Pemecah gelombang Pantai Alai dan Mekung
- g. Pemecah gelombang Pantai Tanjung Bakau dan Tanjung Samak
- h. Revetmen Pantai Pranggas dan Lemang.

Terjadinya abrasi di pulau terluar Riau yang ada di Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir saat ini sudah cukup memprihatinkan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini terus meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengatasi abrasi tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, Taufiq OH mengatakan, untuk mengatasi abrasi tersebut memerlukan dana yang cukup banyak. Sehingga tidak

mampu jika hanya mengandalkan dana dari APBD bsik dari kabupaten atau Provinsi.

"Kalau hanya mengandalkan APBD tidak akan sanggup, karena biaya besar. Untuk itu, kami saat ini sedang meminta bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian PUPR," kata Taufiq, Sabtu (22/8/2020).

Untuk penanganan abrasi tersebut, perlu dilakukan dengan kontruksi pemecah gelombang. Menurutnya, tahun ini pemerintah pusat akan melalui kementerian PUPR akan mulai melakukan pembangunan pemecah gelombang tersebut.

"Namun pekerjaannya belum banyak, padahal yang terjadi abrasi sudah ratusan kilometer. Untuk itu, kami akan terus meminta dukungan pemerintah pusat agar persolan abrasi di Riau segera selesai," harapnya.--

Tabel 1.1 Pengamanan Pantai Kabupaten Kepulauan Meranti

<b>Nama Pulau/Pantai</b>	<b>Panjang Garis Pantai</b>	<b>Perkiraan Pantai Kritis</b>	<b>Kesiapan DED</b>	<b>Kebutuhan Dana (Rp)</b>
<b>Pulau Rangsang</b>	<b>95 Km</b>	<b>42 Km</b>		<b>26.000.000/M</b>
Pantai Tjg. Motong		10 Km	(Rencana Kontruksi Batu Pecah/Turap)	26.000.000/M
Pantai Tanah Merah		6 Km	(Rencana Kontruksi Batu Pecah/Turap)	26.000.000/M
Pantai Tjg. Kedabu		6 Km	(Rencana Kontruksi Batu Pecah/Turap)	26.000.000/M
Pantai Tjg. Medang		20 Km	(Rencana Kontruksi Batu Pecah/Turap)	26.000.000/M
<b>Pulau Merbau</b>	<b>20 Km</b>	<b>8,5 Km</b>		<b>26.000.000/M</b>
Pantai Centai		4 Km	(Rencana Kontruksi Batu Pecah/Turap)	26.000.000/M
<b>Pantai Kuala Merbau</b>		<b>4,5 Km</b>		<b>26.000.000/M</b>
<b>Pulau Padang</b>	<b>20 Km</b>	<b>4 Km</b>		<b>26.000.000/M</b>
Pantai Teluk Belitung		1,2 Km	(Rencana Kontruksi Batu Pecah/Turap)	26.000.000/M

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Tingginya tingkat abrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti terlihat nyata dilapangan. Hal ini jika tidak segera diatasi bisa berdampak serius terhadap masyarakat sekitar. Penanggulangan abrasi dengan menggunakan turap penahan dirasa kurang efektif dan efisien. Hal ini

dibuktikan banyaknya turap-turap penahan gelombang yang telah rusak dan abrasi di daerah tersebut masih terus terjadi. Untuk itu perlu adanya kajian komprehensif yang dilakukan untuk menyusun metode yang tepat dalam penanggulangan abrasi di Kab. Kepulauan Meranti. Salah satunya dengan menanam kembali vegetasi alami mangrove yang sebelumnya ada di sepanjang pantai/ pesisir. Persoalannya adalah tidak mudah menanam mangrove di area yang telah rusak vegetasi alaminya oleh karenanya perlu dilakukan kajian yang ilmiah untuk merumuskan metode/ pendekatan yang tepat dalam penanggulangan abrasi pantai ini.

**Tabel 1.2 Kegiatan Pembangunan Turap Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Kecamatan	Uraian Kawasan Pelaksanaan Program	Anggaran Dana	Sumber Dana
1	Tebing Tinggi	Pembangunan Turap/Parit Beton Gg Lurah Jalan Bakti Selatpanjang	Rp. 900,000,000	APBD Kabupaten
2	Tebing Tinggi	Pembangunan Turap Jalan Tanjung Harapan Selatpanjang	Rp. 1,875,000,000	APBD Kabupaten
3	Tebing Tinggi	Turap Beton Jalan Sidomulyo Rt.01 Rw.06 Desa Alah Air Timur	Rp. 96,000,000	APBD Kabupaten
4	Rangsang Barat	Pembangunan Turap Jalan Penghulu Mamat Sialang Pasung	Rp. 1,125,000,000	APBD Kabupaten
5	Tebing Tinggi	Pembangunan Turap Jalan Tanjung Harapan Selatpanjang	Rp. 1,875,000,000	APBD Kabupaten
6	Pulau Merbau	Pembangunan Turap Beton Jalan	Rp. 1,050,000,000	APBD Kabupaten

		Pelabuhan Dusun 1 Desa Semukut		
7	Tebing Tinggi Timur	Pembangunan Turap Penahan Gelombang Desa Tanjung Sari	Rp. 400,000,000	APBD Kabupaten

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti*

Selanjutnya pemerintah lebih memperhatikan lagi pengamanan pantai untuk daerah abrasi terparah, yaitu pulau rangsang dan rangsang pesisir mengingat dampak abrasi yang sudah meruntuhkan ratusan rumah, kebun dan mengancam kehidupan masyarakat disana. Desa ayun permai kecamatan rangsang dan rangsang pesisir terdapat puluhan kepala keluarga didesa tersebut harus pindah karena tidak lagi yakin bisa berkembang ekonominya bahkan kuburan dan lahan masjid juga turut terjun kelaut akibat abrasi.

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yaitu :

1. Banyaknya daratan atau pantai yang ada di tiga pulau terkikis daratannya dan mengalami pengurangan secara besar-besaran akibat gelombang air laut yang terjadi di Pulau Padang, Pulau Merbau dan Pulau Rangsang yang harus ditanggulangi secara berkesinambungan dengan skala besar.
2. Hilangnya lahan pertanian masyarakat yang ada digaris pantai bahkan beberapa kilometer jalan-jalan penghubung yang berada di kawasan pesisir tersebut amblas ikut hanyut kelaut.
3. Sejauh ini abrasi yang terus menjadi-jadi di kawasan pesisiran Pulau Rangsang nampaknya belum mendapat perhatian khusus dari pihak manapun. Padahal sudah belasan mil daratan terkikis oleh terjangan ombak dari arah Selat Melaka. Amukan gelombang terus memecah

di seluruh pesisir Pulau Rangsang, kondisi ini suatu hal yang luar biasa terjadi di daerah itu bahkan isu terbesar yang ada di kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak tergubris oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

4. Upaya dinas pekerjaan umum dalam mengatasi abrasi dengan cara pembangunan turap sebagai pemecah gelombang masih belum optimal dan merata dilihat dari pulau rangsang yang memiliki abrasi yang terparah, ternyata masih belum mendapatkan perhatian pemerintah sama sekali, dan belum adanya pembangunan turap didaerah pulau rangsang tersebut.

**Tabel 1.3 Pengamanan Pantai Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Lokasi Kegiatan	Panjang (M)			Sumber Dana
		2012	2016	2017	2016-2017
1	Pengaman Pantai di Desa Tanjung Motong	80	140	173	APBD Provinsi
2	Pengaman Pantai di Desa Centai		118	-	APBD Provinsi
3	Pengaman Pantai di Kelurahan Teluk Belitung		140	103	APBD Provinsi
4	Pengaman Pantai di Desa Tanah Merah		-	106	APBD Provinsi
5	Pengaman Pantai di Desa Gayung	200			BWSS III
6	Pengaman Pantai di Desa Kedabu Rapat	200	80		APBN

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti*

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan fenomena sebagaimana di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah **Bagaimana Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti ?**

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam mengatasi masalah abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengatasi abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pemerintahan khususnya berkaitan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Secara Praktis penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau masukan di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya kepada Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Secara akademis sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan khususnya para Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit kata perintah tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintahan dalam bahasa inggris disebut government yang berasal dari bahasa latin gubernate, greek gibernen yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012;6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hokum dalam sebuah Negara.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Ndraha (2003;3).

Ndraha (2003;5) mempunyai pendapat pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga

pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. (Yusri Munaf, 2016:47).

Kemudian di dalam Al-qur'an juga dijelaskan dengan memiliki definisi terhadap pengertian pemerintahan yang terdapat pada surat ke 3 ayat 104 dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak pada kebenaran, melarang dari hal buruk, itulah orang yang beruntung (dalam Syafie dan Azikin, 2008;10).

Adapun yang menjadi tugas dari pemerintah menurut Atmosudirdjo (dalam Syafie, 2011;9) antara lain adalah tata usaha Negara, rumah tangga Negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Sedangkan menurut Nugroho (2003;75) menjelaskan bahwa didalam masyarakat terdapat 3 jenis pokok yang diperlukan agar masyarakat hidup, tumbuh dan berkembang, yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan dan tugas pemberdayaan.

- 1) Tugas Pelayanan adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu menjangkaunya.
- 2) Tugas Pembangunan adalah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat.
- 3) Tugas Pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Makna pada konsep diatas dapat dianggap sebagai suatu konsekuensi dari pemberian wewenang atau tanggung jawab pemerintah atasan/pusat

kepada pemerintah bawahan/daerah yang diikuti pula dengan sumber pembiayaan dan pada akhirnya disertai juga dengan pengawasan terhadap pelimpahan tanggung jawab tersebut. Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu member arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang.

Rasyid (dalam Labolo, 2006;22) membagi fungsi pemerintah menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering) dan peraturan (regulation).

## **2. Konsep Kebijakan**

Kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman. Pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, visi organisasi Pasolong (2008;92).

Kebijakan dalam Kybernologi dan dalam kebijakan pemerintahan (Ndraha, 2011:493), adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan lahir dari kearifan actor atau lembaga yang bersangkutan.

Winarno (2012:19) dan Wahab (2010:1-2) sepakat mengatakan bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design (dalam Zaini Ali dan Raden Imam, 2015:4).

Carl Fried memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (dalam Budi Winarno, 2014:20-21).

Menurut Anderson (dalam Indihono, 2009:17) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintahan melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan memperoleh aspek yang penting dari keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan pemerintah Sumaryadi (2013:83).

### **3. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik (Inggris, Publik Policy) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat keputusan publik maka kebijakan haruslah dibuat oleh otoritas

politik, yakni mereka yang menerima mandate dari public atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintahan. Fokus utama kebijakan publik dalam Negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Selanjutnya Nugroho (dalam Zaini Ali dan Raden Imam, 2015:10) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama.

#### **4. Konsep Peranan**

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007;845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan:.

Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu-individu tersebut. Dalam

hubungan-hubungan timbal balik tersebut, kedudukan dan peranan individu mempunyai keseimbangan kepentingan-kepentingan individu termaksud. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Peranan menurut Soekanto (2007;212): “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.

Menurut Soekanto (2007;213) mencakup sedikit tiga pengertian ;

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

Dari pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan terhadap sesuatu hal atau

kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam kedudukan suatu organisasi.

## 5. Abrasi

Abrasi adalah proses perubahan bentuk pantai atau erosi pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut. Penyebab abrasi karena faktor alam dan atau faktor manusia. Proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan oleh angin yang bertiup diatas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut yang mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai. Sedangkan faktor manusia misalnya kegiatan penambangan pasir, kegiatan reklamasi. Kotodie (2010:329).

Akibat dari abrasi ini akan menyebabkan pantai menggetarkan batuan ataupun tanah dipinggir pantai sehingga lama-kelamaan akan berpisah dengan daratan dan akan mengalami abrasi pantai. Proses terjadi Abrasi yaitu pada saat angin yang bergerak dilaut menimbulkan arus serta gelombang mengarah ke pantai, sehingga apabila proses ini berlangsung lama akan mengikis pinggir pantai. Kekuatan gelombang terbesar dapat terjadi pada waktu terjadi badai dan badai inilah yang mempercepat terjadi proses pantai. Abrasi ini selain disebabkan faktor alam bisa juga disebabkan karena faktor manusia, seperti contoh melakukan penambangan pasir, dikatakan demikian karena penambangan pasir begitu penting terhadap abrasi suatu pantai yang dapat menyebabkan terkurasnya pasir laut dan inilah sangat berpengaruh terhadap arah dan kecepatan arus laut karena akan menghantam pantai.

Fenomena-fenomena alam yang menyebabkan abrasi di antaranya adalah pasang surut air laut, angin di atas lautan yang menghasilkan

gelombang serta arus laut yang berkekuatan merusak. Sebab-sebab yang demikian hampir tidak bisa dielakkan sebab laut memiliki siklusnya sendiri dia mana pada suatu periode, angin bertiup amat kencang dan menciptakan gelombang serta arus yang tidak kecil. Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan abrasi dari ulah manusia di antaranya adalah ketidakseimbangan ekosistem laut dan pemanasan global atau yang umum disebut global warming. Ketidakseimbangan ekosistem laut misalnya terjadi akibat eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan laut mulai dari ikan, terumbu karang dan lain sebagainya sehingga arus dan gelombang laut secara besar-besaran mengarah ke daerah pantai dan berpotensi menyebabkan abrasi.

## **6. Pembangunan**

Menurut Coralle Bryant dan Loulse White (dalam taliziduhu ndraha (1990:15-16) pembangunan adalah upaya yang meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima Implikasi utama defenisi tersebut.

- 1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (capacity)
- 2) Pembnaganan berarti mendorong tubuhnya bersamaan dan pemerataan nilai kesejahteraan (equality)
- 3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalm bentuk kesepakatan bersama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment)

- 4) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence)

Menurut Taliziduhu Ndraha (2001:134) pembangunan pemerintah adalah pembangunan kemampuan pemerintah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik layanan sipil.

## 7. Pengelolaan

Menurut Kotodie (2010:61) pengelolaan didefinisikan sebagai suatu aktivitas, seni, cara, gaya, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dalam mengendalikan atau mengelola kegiatan.

Tahap pengelolaan dimulai dari :

1. Pengorganisasian
2. Operasi
3. Pemeliharaan
4. Organisasi
5. Kepemimpinan
6. Pengendalian sampai pada evaluasi dan monitoring.

Pengelolaan atau manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumberdaya organisasi. Hanafi dalam Kotodie (2010:347).

## 8. Pengendalian

Menurut Robert J.Kotodie (2010:64) pengendalian merupakan upaya control pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap SDM organisasi hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada manfaat dari pengendalian ini dapat meningkatkan eksistensi dan efektifitas dari sisi-sisi waktu (time), ruang (space), biaya (cost) dan sekaligus untuk peningkatan kegiatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengendalian ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui bagaimana kegiatan bagian dari kegiatan itu bekerja penyimpangan atau kesalahan dapat segera diketahui dan diperbaiki. Pengendalian ini juga berfungsi untuk menekan kegiatan kecil mungkin dan juga harus menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi normal ke kondisi kritis.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2011:199) pengendalian adalah setiap keputusan yang dibuat berisi kendali sebagai alat untuk mengarahkan organisasi pada tujuan, dalam kecepatan tertentu.

## 9. Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan, penganggaran juga menjadi salah satu faktor utama suksesnya suatu pembangunan baik dalam situasi normal maupun darurat. Kotodie (2010:64-65). Pemeliharaan prasarana sumber daya air terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air. Kotodie (2010:379).

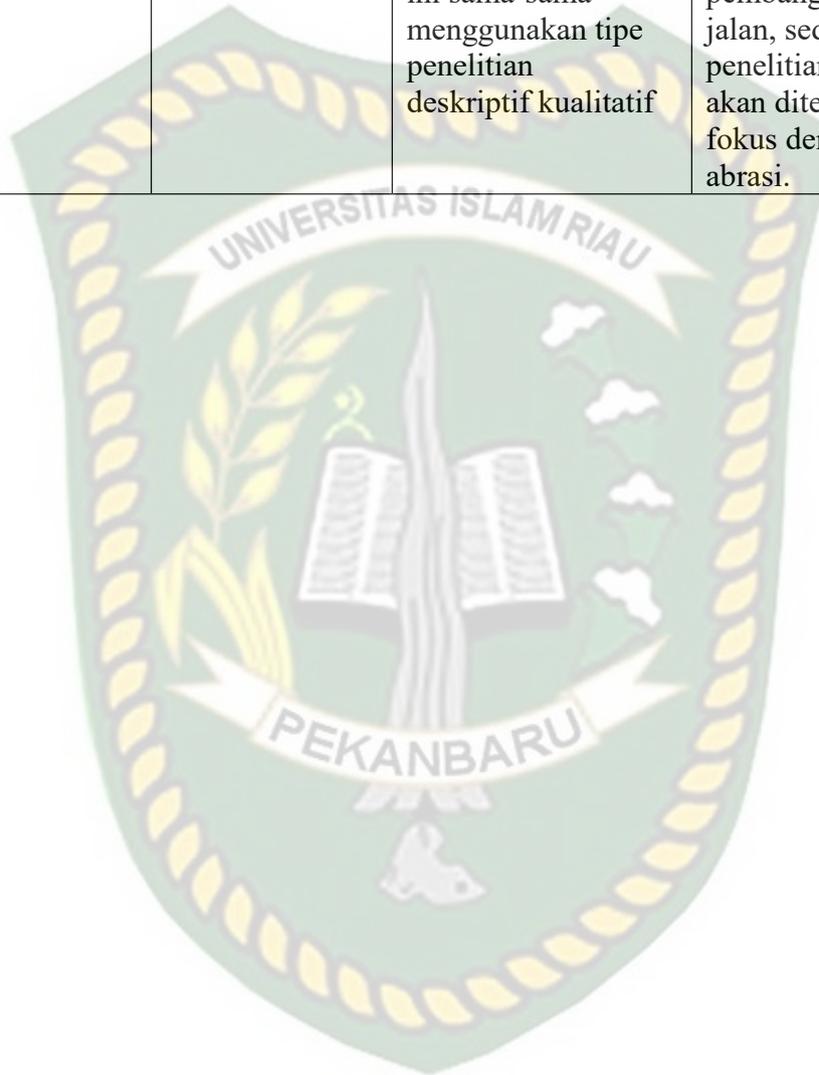
## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat kembali judul penelitian terdahulu karena menurut penulis masalah yang diteliti oleh penelitian terdahulu belum terselesaikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel I.4**

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rika Hendriyani, 2015.	Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti 2015	Adapun persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu ini dengan penelitisn yang akan diteliti ini yaitu : penelitian ini sama-sama menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif	Yang menjadi perbedaan dan juga sebagai acuan dari penelitian ini yaitu : penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap kegiatan pembangunan penahan atau turap dan pemecah gelombang, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini lebih cenderung mencari apa saja hambatan yang dihadapi dinas pekerjaan umum dalam mengatasi abrasi selama ini, dan mengapa abrasi didaerah tersebut masih terus terjadi.

Nur Ema Purnama	Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Jalan di Kecamatan Sangkulirang	Adapun persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu ini dengan penelitsn yang akan diteliti ini yaitu : penelitian ini sama-sama menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif	Yang menjadi perbedaan dan juga sebagai acuan dari penelitian ini yaitu : penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap pembangunan jalan, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini fokus dengan abrasi.
-----------------	--	---	---



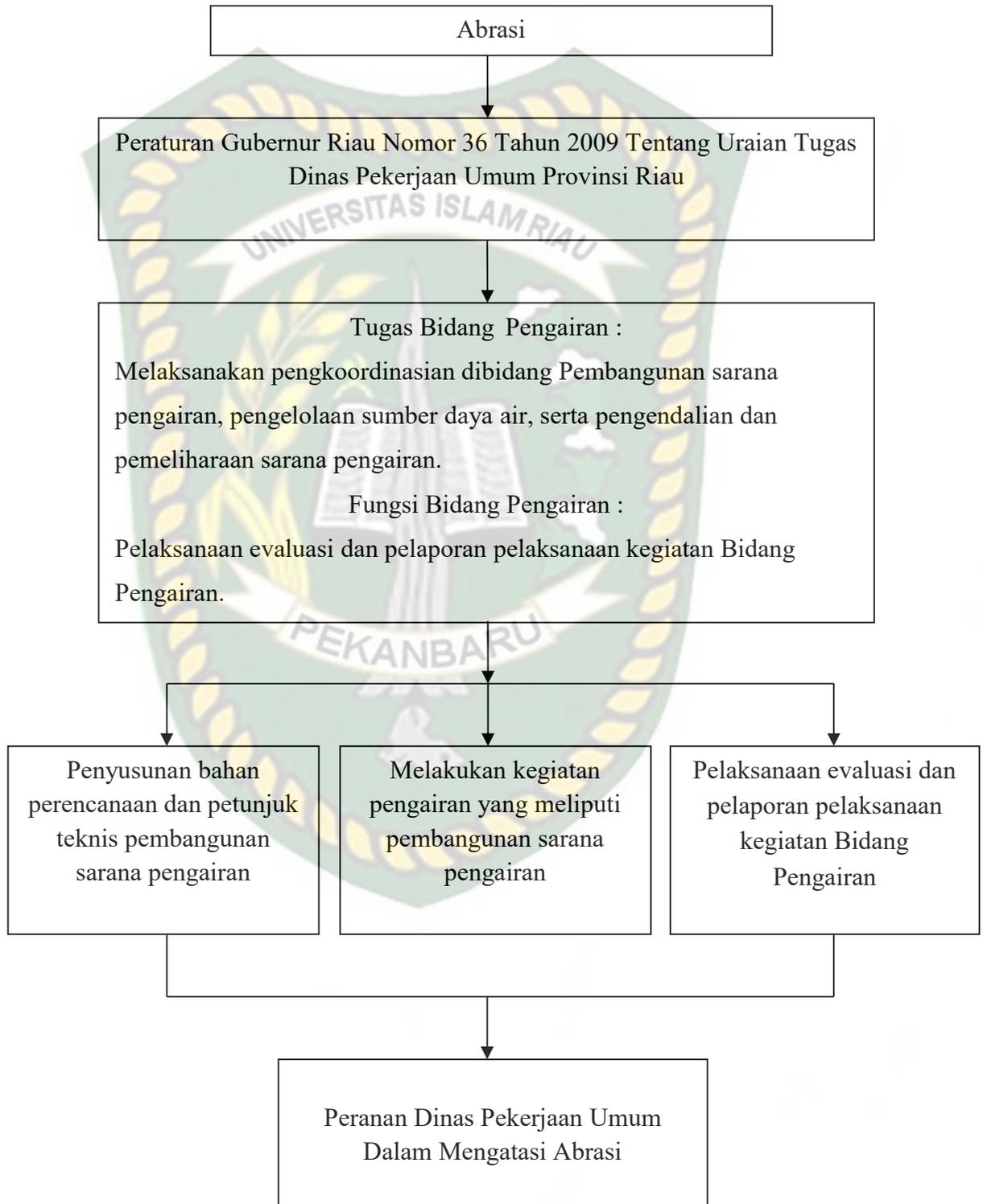
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dari peranan dinas pekerjaan umum dalam mengatasi abrasi yaitu :

**Gambar I.I**



Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

#### D. Konsep Operasional

Untuk member pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui konsep operasional sebagai berikut :

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum yang hasilnya akan dilihat untuk memenuhi tujuan.
2. Dinas pekerjaan umum adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengendalian daya rusak air.
3. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.
4. Pembangunan adalah upaya pencegahan abrasi yang dilakukan dengan bangunan turap.
5. Pengelolaan adalah kerja sama yang dilakukan dengan dinas terkait.
6. Pengendalian adalah keputusan yang dilakukan untuk mengawasi pembangunan turap supaya tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.
7. Pemeliharaan adalah menjaga lingkungan dengan memberikan peran masyarakat didalamnya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tipe *Deskriptif*, menurut Damadi (2013;6) yaitu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, adapun dalam penelitian ini analisa terhadap permasalahan yang dihadapi Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Data dan informasi berkaitan dengan variable akan diperoleh dengan wawancara terhadap responden dan informasi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hasil seluruh informasi dan data yang telah diperoleh dijadikan sebagai pedoman dan referensi untuk mengidentifikasi dan menganalisa masalah. Adapun metode yang digunakan adalah metode Kualitatif.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan dikantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dimana melihat kondisi alam yang terjadi, abrasi merupakan ancaman besar bagi masyarakat yang tinggal dipesisir pantai yang mengalami abrasi terparah, yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Maka dari itu penulis mengambil masalah abrasi tersebut.

#### C. Responden Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah warga setempat yang merasakan dampak langsung dari abrasi., dan yang menjadi key informant pada penelitian ini yaitu Bapak Muhammad Faisal, ST sebagai

Kepala Seksi Pembangunan Sarana Pengairan di Dinas Pekerjaan Umum yang bersedia memberikan informasi yang diperlukan peneliti dalam mengolah data yang akan datang.

#### **D. Teknik Penarikan Informan**

Peneliti menarik informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2009:85) teknik sampling yang member peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pemilihan elemen-elemen sampel didasarkan pada kebijaksanaan peneliti sendiri. Pada prosedur ini, masing-masing elemen tidak diketahui apakah berkesempatan menjadi elemen-elemen sampel atau tidak. Dimana jenis penarikan sample dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* dengan dasar pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah kelompok yang dianggap professional dalam lingkup pemerintahan serta kaitannya dengan peranan dinas pekerjaan umum dalam mengatasi abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui pengambilan data dan hasil wawancara yang didapat. Data primer yang dimaksud adalah tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

##### **2. Data Skunder**

Data skunder merupakan data pendukung yang penulis peroleh dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang

sifatnya melengkapi data primer seperti gambar pembangunan struktur pemecah gelombang, gambar pengamanan pantai, uraian tugas dan fungsi.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah :

1. Wawancara (interview) yaitu melakukan dialog secara mendalam atau percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden guna melengkapi data yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dalam kebutuhan penelitian ini.
2. Observasi/pengamatan langsung ketempat penelitian dimana penulis langsung mengunjungi tempat penelitian untuk memperoleh data-data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu suatu analisis yang berusaha memberikan gambaran yang terinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan.\

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif yang dilengkapi dengan data.

Dengan teknik analisis data deskriptif, peneliti dapat memberikan gambaran bahwasannya hasil observasi terkait Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Dikabupaten Kepulauan Meranti masih banyak mengalami hambatan-hambatan yang perlu diperhatikan untuk kedepannya. Dan yang paling menjadi perhatian khusus adalah masih perlunya peningkatan terkait tugas pokok dan fungsi instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.I : Jadwal Waktu Penelitian tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020/2021																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	X																
2	Seminar UP							x													
3	Revisi UP								x	x	x										
4	Penelitian Lapangan											x	x								
5	Pengelolaan dan analisis data													x	x						
6	Bimbingan Skripsi														x	x	x				
7	Ujian Skripsi																	x			
8	Revisi Skripsi																		x	x	
9	Pengesahan dan penyerahan skripsi																				x

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. SEJARAH SINGKAT KABUPATEN KEPULUAN MERANTI

##### 1. Gambaran Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari sembilan Kecamatan yaitu, Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau, Merbau, Tasik Putri Puyu, dan Tebing Tinggi Timur.

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1997, seruan pemekaran kembali dihembuskan oleh masyarakat pada 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BP2KM) Sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituang dalam keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis

Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan terhadap pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 Tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 1396/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Drs. H. Syamsuar, M.Si adalah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran yang dilantik pada hari Selasa, 26 Mei 2009, oleh Medagri Mardiyanto di Jakarta. Selanjutnya berdasarkan hasil pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 3 juni 2010 terpilih pasangan Drs. Irwan, M.Si dan Drs Masrul Kasmi, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati pertama terpilih sekaligus Bupati dan Wakil Bupati pertama di Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian dilantik pada hari Jum'at, 30 Juli 2010 oleh Gubernur Riau, H. Rusli Zainal atas nama Mendagri Gamawan Fauzi, SH. MM Di Selatpanjang.

Sejarah geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada koordinat antara sekitar 0042'30"-1028'0"-103010'0" BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumater, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi (Grow Triagle) Indonesia-Malaysia-Singapore(IMS GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam-Tanjung Balai

Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai gerbang lintas batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota pusat Kegiatan strategis negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas Kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kota selatpanjang adalah 849,50 km<sup>2</sup>.

Bentang alam Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah Alluvial dan Grey Humus dalam bentuk Rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan Bakau (Mangrove). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, perkebuan dan perikanan. Karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan kedalaman solum cukup dalam dan bergambut(>100cm), tekstur lapis bawah halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan kemik (tingkat pelapukan sampai tingkat menengah), konsistinsi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah tergolong sangat masam dengan Ph berkisar antara 3,1-4,0 dan kepekatan terhadap erosi termasuk rendah. Formosi geologinya terbentuk dari jenis batuan endapan aluvium muda berumur holosen dengan litologi lempung, lanau, kerikil kecil dan sisa tumbuhan dirawa gambut, tidak ditemukan daerah rawan longsor karena arealnya datar, yaitu rawa gambut, berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1: 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa

kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0-8% dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25- 32 Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi flora yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain seperti : Meranti, Kulim, Sungkai, Punak, Jelutung, Medang, Tembusu, Bintangor, dan Bakau. Sebagian besar jenis kayu tersebut merupakan jenis komersial dan bahan baku industri. Sementara jenis fauna yang ada di daerah ini, meliputi: Lutung, Siamang, Kera, Ungka, Pelanduk, Ayam Hutan, berbagai jenis ular, berbagai jenis burung seperti Elang, Selendit, 18 Puyuh, Mahkota, Enggang, Punai, Pergam dan lain-lain. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa Pulau besar seperti pulau Tebing Tinggi( 1.438,83 km<sup>2</sup>), Pulau Rangsang (922,10) km<sup>2</sup>) Pulau Padang dan Merbau( 1.348,91 km<sup>2</sup>).

#### Visi

“Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul dalam Tuntunan Masyarakat Madani”

#### Misi

1. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintah yang Efisien dan Efektif.
2. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal;
4. Meningkatkan sumber daya manusia dan produktifitas;

5. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk. Revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi;

6. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi;

7. Meningkatkan pembinaan mental Spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah kabupaten dilingkungan Propinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti terletak antara 01039'33" - 01025'08" LU dan 102010'29" - 103016'43" BT, dengan luas wilayah 3.707,84 KM2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan selat malaka dan Malaysia
- Sebelah Barat : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Selat Pinang dan Kab. Karimun

Sedangkan secara administrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 7 Kecamatan dan 73 Desa. Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti yang cukup strategis yang berbatasan langsung dengan selat malaka dan malaysia menyebabkan daerah ini semakin cepat berkembang terutama di sektor insdustri jasa dan perdagangan.Perkembangannya yang cepat menyebabkan Kepulauan Meranti menarik bagi orang-orang luar daerah sehingga banyak pendatang masuk ke Kepulauan Meranti dan mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang makin

besar. Pada periode 2000 – 2010 laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,60 % per tahun. Hal tersebut dapat mengakibatkan makin kompleksnya permasalahan yang timbul, diantaranya masalah konflik sosial dan kebutuhan prasarana dan sarana yang meningkat. Dibidang ketenagakerjaan juga timbul masalah pengangguran yang disebabkan tenaga kerja yang bertambah, sementara daya tampung lapangan kerja baik sektor industri maupun jasa relatif terbatas. Angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2001 sebesar 8,60 % dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 8,77 %. Semakin berkembangnya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah kawasan niaga maka semakin tinggi pula tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan warga kota terhadap pelayanan penyediaan prasarana dasar wilayah maupun pelayanan perijinan terus berkembang sesuai dengan tingkat hidup warga kota baik dalam volume maupun ragamnya.

Pelayanan perijinan seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang yang meliputi usaha-usaha pengawasan yang terdiri dari pelaporan, pemantauan, evaluasi dan penerbitan dan khusus untuk kabupaten/kota ditambah dengan perijinan. Dalam prakteknya di lapangan, mekanisme perijinan ditempatkan sebagai unsur terdepan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Perijinan menjadi hal yang sangat penting.

justu karena mekanisme ini merupakan tahap awal dari pengendalian pemanfaatan ruang. Bila mekanisme perijinan diselenggarakan dengan baik, maka penyimpangan pemanfaatan ruang akan dapat ditekan seminimal mungkin.

Selain sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, perijinan juga dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya disuatu daerah. Bila pengurusan perijinan dapat ditempuh dengan mudah, cepat, murah dan mempunyai kepastian hukum, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi didaerah tersebut. Sebaliknya, bila pengurusan perijinan berbelit-belit, tumpang-tindih dan memakan waktu yang lama serta biaya mahal, maka investor justru akan menganggapnya sebagai pengahambat. Oleh karena itu, mekanisme perijinan yang efektif dan efisien akan berperan besar dalam pengembangan kegiatan perekonomian daerah. Perijinan merupakan upaya untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.

Perencanaan regional Propinsi Riau yang tidak terintegrasi sering menimbulkan friksi antar daerah-daerah yang berada diwilayah tersebut termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Kerjasama dalam bidang perencanaan terutama perencanaan Pekerjaan Umum perlu lebih ditingkatkan dengan daerah lainnya diantaranya Siak, Bengkalis, sehingga perencanaan yang dihasilkan bisa lebih terintegrasi.

#### **B.Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti**

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penguatan karena secara eksplisit mengembang amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif . Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini,

bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis menghadapi pekerjaan secara akumulatif makin bertambah. Berangkat dari pemikiran tersebut, berikut ini digambarkan kondisi umum M. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2011 sebanyak 44 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan / Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta diklat penjurangan (struktural), sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Dinas Pekerjaan Umum**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	S3	-	-
2	S2	5	5,49%
3	S1	22	24,17%
4	D3	5	5,49%
5	SDs.dSLTA	59	64,83%
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>	<b>100%</b>

Sumber : RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum

Dari data tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah mayoritas terbanyak tingkat pendidikan formal pegawai dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan

meranti adalah tamatan SD s.d SLTA yang berjumlah 59 orang, dengan persentase 64, 83%.

**Tabel 4.2. Pendidikan dan Latihan Penjurangan (Struktural), Teknis dan Substantif Fungsional yang Telah Diikuti Oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pendidikan dan Latihan	Jumlah (orang)
1	SPAMEN, Diklat Pim II	1
2	SPADYA/SPAMA/Diklat Pim III	3
3	SEPADA/ADUM/Diklat Pim IV	2
4	Kursus Manajemen Proyek	4
5	Pelatihan Analisa Jabatan	1
6	Kursus Bendaharaan	1
7	Perpajakan	1

Sumber : RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum

Kepala Dinas : 1 Orang

Kepala Bidang : 5 Orang

Kepala Sub Bidang : 2 Orang

Kepala Seksi : 5 Orang

Pelaksana CPNS : 22 Orang

Tenaga Kontrak/Honorar : 56 Orang

Dengan status kepegawaian sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil Gol. IV : 3 Orang

Pegawai Negeri Sipil Gol. III : 7 Orang

Pegawai Negeri Sipil Gol. II : 3 Orang

CPNS : 22 Orang

TenagaKontrak/Honoror : 56 Orang

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan bidang teknik sebanyak 22 orang (9,68%), dan bidang lainnya sebanyak 20 orang (8,80%) ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti belum dapat secara optimal. Idealnya 2/3 dari jumlah pegawai yang ada berkualifikasi pendidikan teknik atau 30 Orang (13,20%). Beberapa telah mengikuti diklat struktural pimpinan dengan kualifikasi Sarjana sebanyak 35 orang (14,08%) dan pendidikan tingkat SLTA sebanyak 12 orang (5,28%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Kurang Memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, dan dari segi kuantitas masih belum mencukupi untuk mengemban tugas ke PU-an yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Disamping beberapa fakta diatas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dihadapkan pada kondisi belum tersediaanya data base keciptakaryaan, kebinamargaan dan pengairan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan bahwa kabupaten Kepulauan Meranti masih berumur 3 (tiga) tahun. (Kabupaten termuda di Provinsi Riau).

Selain itu juga minimnya ketersediaan fasilitas gedung dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan tugas ke PU-an menyebabkan terhambatnya dalam menyelesaikan tugas-tugas pembangunan daerah.

Oleh sebab itu sejalan dengan pembangunan daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kepada Pemerintah Daerah dan

Legislatif untuk member dukungan atas kelemahan dan keterbatasan diatas.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi . Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif, dan inovatif.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan visi adalah sebagai berikut :  
“Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Ke PU-an handal berhasil guna serta berwawasan Lingkungan menuju Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul.”

Penjelasan makna visi tersebut diatas sebagai berikut :

Visi tersebut di atas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai suatu lembaga teknis pembangunan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi guna mewujudkan Prasarana dan Sarana yang berhasil guna dengan memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya menuju kawasan Niaga yang maju dan unggul.

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan Misi, Misi Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Meranti mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Mewujudkan Prasarana dan Sarana ke PU-an yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata dengan bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat serta melibatkan seluruh stakeholder.
2. Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan aman dicapai melalui tersedianya prasarana dasar dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjelasan Misi adalah sebagai berikut :

- Misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi sarana dan prasarana fisik secara adil dan merata dengan pelibatan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder serta bagaimana menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada.
- Dengan terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana diharapkan agar dapat memperhatikan lingkungan yang nyaman dan aman sehingga sarana dan

prasarana yang tersebut tidak mengganggu keberadaan lingkungan tapi justru saling mendukung antara sarana dan prasaran yang ada dengan lingkungan.

### **Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
  - Sub Bagian Perencanaan dan Program
  - Sub bagian Administrasi Umum
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Ruang
  - Seksi Tata Kota
  - Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
  - Seksi Pengendalian Tata Ruang
4. Bidang Cipta Karya
  - Seksi Tata Bangunan
  - Seksi Sarana Lingkungan
  - Seksi Pemelihara Sarana Bangunan
5. Bidang Bina Marga
  - Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
  - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
  - Seksi Pembangunan Pemeliharaan Jembatan

6. Bidang Pengairan
  - Seksi Pembangunan Saran Pengairan
  - Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air
  - Seksi Pengendalian Sarana Pengairan
7. Bidang Pemadam Kebakaran
  - Seksi Operasional
  - Seksi Sarana dan Prasarana
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibidang Pekerjaan Umum sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan ,perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan bidang;

- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
  - a) Sub bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang penyusunan program, perencanaan dan Pelaporan.
  - b) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c) Sub bagian administrasi umum mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi Umum dan kepegawaian.
- 2) Bidang Pengairan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengairan.
  - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengairan;
  - b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pengairan;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pengairan.
    - a) Seksi Pembangunan Sarana Pengairan mempunyai tugas Merencanakan

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan Sarana Pengairan.

b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.

c) Seksi Pengendalian Sarana Pengairan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengendalian Sarana Pengairan.

3) Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga.

a) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia,

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.

b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.

c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.

4) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum ;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Tata Ruang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Tata Ruang.

a) Seksi Tata Kota mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Tata Kota.

b) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.

c) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang.

5) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya.

a) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Tata Bangunan.

b) Seksi Sarana Lingkungan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana Lingkungan.

c) Seksi Pemeliharaan Sarana Bangunan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemeliharaan Sarana Bangunan.

6) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran.
  - a) Seksi Operasional mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Operasional.
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana dan Prasarana.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam bab ini peneliti mencoba menjelaskan identitas dari responden yang telah ditentukan dan informasinya dapat diketahui melalui tahap wawancara sehingga dapat menjawab segala kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti. Adapun tahap responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Tingkat Usia Responden

Berdasarkan tingkat usia responden maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai informasi yang didapat dilapangan oleh peneliti untuk keyformen dan informenya sebagai berikut:

**Tabel. V.1 keadaan responden berdasarkan tingkat usia**

No	Responden	Tingkat Usia				Jumlah
		21-30	31-40	41-45	>45	
1	Kepala seksi pembangunan sarana pengairan	-	-	1	-	1
2	Staf bidang sumber daya air	2	1	-	-	3
3	Masyarakat	-	-	1	2	3
Jumlah		2	1	2	2	7

Dari tabel v.1 diatas dapat diketahui bahwa 7 orang responden tersebut sejumlah 3 responden terdiri dari masyarakat yang memiliki usia 41-45 1 orang, dan diatas 45 tahun 2 orang, sedangkan kepala seksi perencanaan teknis sumber daya air yang memiliki usia 41-45 Tahun 1 orang, dan Staf Sumber daya air yang memiliki usia 21-30 Tahun 2 orang, 31-40 Tahun 1 orang.

## 2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tingkat pendidikan responden maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai informasi yang didapat dilapangan oleh peneliti untuk keyformen dan informenya sebagai berikut:

**Tabel. V.2 keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Responden	Tingkat pendidikan				Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Serjana	
1	Kepala seksi pembangunan sarana pengairan	-	-	-	1	1
2	Staf bidang sumber daya air	-	-	-	3	3
3	Masyarakat	2	-	1	-	3
	Jumlah	2	-	1	4	7

Dari tabel V.2 diatas dapat diketahui bahwa 7 orang responden tersebut sejumlah 3 responden terdiri dari masyarakat yang memiliki Pendidikan SLTA 1 orang, dan SD 2 orang, sedangkan kepala seksi perencanaan teknis sumber daya air yang memiliki Tingkat Pendidikan Serjana 1 orang, dan Staf Sumber daya air yang memiliki Tingkat Pendidikan Serjana 3 orang.

## 3. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin responden maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai informasi yang didapat dilapangan oleh peneliti untuk keyformen dan informenya sebagai berikut:

**Tabel. V.3 keadaan responden berdasarkan jenis kelamin**

No	Responden	Jenis kelamin		Jumlah
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala seksi pembangunan pengairan	-	1	1
2	Staf bidang sumber daya air	2	1	3
3	Masyarakat	2	1	3
Jumlah		4	3	7

Dari tabel v.3 diatas dapat diketahui bahwa 7 orang responden tersebut sejumlah 3 responden terdiri dari masyarakat yang memiliki jenis kelamin laki-laki 2 orang dan 1 orang perempuan, sedangkan kepala seksi pembangunan sarana pengairan yang memiliki jenis kelamin perempuan 1 orang, dan Staf Sumber daya air yang memiliki jenis kelamin Laki-Laki 2 orang, Perempuan 1 orang.

#### **B. Peranan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam mengatasi abrasi (Studi di Pantai Kabupaten Kepulauan Meranti)**

Abrasi merupakan masalah yang sangat besar apa bila tidak ditangani dimana dampak dari terjadinya abrasi ini yaitu kerusakan sarana dan prasarana serta pulau akan semakin mengecil akibat abrasi pantai, kerusakan hutan bakau sepanjang pantai karena ombak begitu besar, terkikisnya daratan sehingga mengancam tempat tinggal masyarakat dan juga mata pencarian masyarakat seperti lahan kebun karet dan kelapa dan nelayan, adapun dampak yang begitu besar yaitu bisa menenggelamkan sebuah pulau. Namun dalam hal ini, sangat diperlukan perhatian pemerintah melalui program-program untuk mengatasi masalah abrasi namun hal ini bukan hanya tugas pemerintah namun hal ini juga tugas masyarakat

untuk menjaga lingkungannya mengingat banyaknya terjadi penebangan bakau secara liar.

Adapun masyarakat desa muntai dengan mata pencarian nealayan dan juga petani karet dan kelapa dan dari meraka masih banyak juga yang menebang pohon bakau dan tidak mengetahui apa itu abrasi dan dampak abrasi sehingga hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dulu. Dan dari sini bisa dilihat bahwasanya belum ada perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dengan penduduk desa muntai , sehingga abrasi yang makin meluas terus menerus terjadi.

Adapun untuk mengetahui peranan dinas pekerjaan umum provinsi riau dalam mengatasi abrasi (studi di pantai Tanjung Motong Kabupaten Kepulauan Meranti) maka peneliti menggunakan beberapa indikator diantaranya:

### **1. Pembangunan**

Pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi janji politik kepada rakyat,dari sisi rakyat. Pembangunan merupakan kebutuhan rakyat dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dan tujuan yang harus dicapai dlam rangka mensejahtrakan kehidupan rakyat.

Adapun tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pembangunan ini adalah:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan yang mana perencanaan ini dilakukan dengan menunjuk staf yang diberikan tugas untuk terjun kelapangan, sehingga mendapatkan informasi untuk membenahi masalah yang ada dan

juga untuk pengajuan proposal dibidang sumber daya air menyangkut masalah abrasi.

- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundangan-undangan kebijakan teknis, agar dalam melaksanakan kegiatan untuk melakukan perencanaan hingga pengevaluasi sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum.
- c. Mencari, mengumpulkan menghimpun, mensistemastikan dan mengelola data serta menganalisa data dan informasi yang merupakan hasil dari perencanaan yang telah dilakukan tadi, maka staf yang telah ditunjuk tersebut bisa langsung terjun kelapangan untuk mencari informasi dan data yang akurat, kemudian informasi dan data tersebut diolah sehingga ditemukan maalah yang harus diselesaikan.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Novira, St. Msi (Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air) beliau mengatakan:

*“ tidak ada data tentang berapa kilometer garis abrasi dari pantai kedaratan , kalau dari kami (dinas) tidak mengukur jarak abrasi yang sangat luas itu tapi kalau untuk panjang garis abrasi yang terjadi sudah ratusan meter yang ambruk kelaut.”*( Hari Rabu 3 Oktober 2020 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau)

Maka dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan :

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut dapat dilihat bahwa dinas tidak memiliki data tentang berapa meter atau kilometer garis abrasi dari pantai kedaratan, dinas hanya memiliki panjang garis abrasi yang terjadi dipinggiran pantai hal ini dapat menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk

melakukan pengumpulan data dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam bidang sumber daya air ini tidak memiliki data yang cukup akurat sehingga informasi yang seharusnya dimiliki oleh dinas sebagai pedoman untuk mengukur berapa laju abrasi dari pantai kedaratan, sehingga dampak yang ditimbulkan akibat abrasi bisa menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan, namun jawaban sama yang peneliti terima dari responden tersebut bahwa dinas tidak memiliki data berapa jumlah tanah dan perkebunan warga yang telah terjun kelaut tersebut. Maka dari itu bisa kita lihat kurangnya data maupun informasi secara lengkap yang dimiliki oleh dinas pekerjaan umum bidang pengairan ini sehingga perencanaan didalam pembangunan hanyaq difokuskan kepada pembangunan seperti turap pengaman pantai dan pemecah gelombang saja, yang diperoleh oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air dan seharusnya dinas lebih memperhatikan lagi informasi dan data yang sehingga dapat membantu masyarakat bukan hanya melalui pembangunan seperti turap, melainkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meraskan dampak abrasi.

- d. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas bidang sumber daya air yakni pada seksi sungai pantai dan danau serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah persiapan bahan ini dilakukan dengan cara mengimput data dengan mencari solusi akan masalah yang telah ada sehingga masalah abrasi ini bisa diatasi dengan segera mungkin.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Anto ( nelayan ) beliau mengatakan:

*“ saya sudah seumur hidup tinggal di desa motong ini, namun sampai saat ini belum ada pembangunan yang efektif didaerah ini bahkan kebun saya dan warga sini sudah ratusan meter yang jatuh kelaut, bahkan dipantai adalah kebun karet dan kelapa milik masyarakat yang tinggal didekat sin bahkan kebun kelaa milik sya yang ada diinggir antai sudah 200an meter yang sudah habis. Kalau untuk penanaman pohon bakau juga dirasa belum maksimal masih setengah hati cuman ada acara tertentu atau ada pejabat saja baru ada penanaman bibit bakau dan hanaya sesekali ada orang dinas datang untuk meantau”*( pada hari sabtu 6 september 2020 di Pantai Motong Kabupaten Kepulauan Meranti)

Maka dari hasil wawancara dengan bapak Andi selaku responden dapat disimpulkan bahwa :

Dalam masalah abrasi didaerah ini cukup parah yang dirasakan oleh masyarakat dan juga pembangunan dan tindakan dalam mengatasi masalah abrasi ini dirasa masih sangat minim. Maka dari itu perlu perhatian dari pemerintah secepatnya dalam mengatsi maslah abrasi yang mana didalam tugas dan fungsi yang dimiliki dinas pekerjaan umum dan pentaan ruang ini dibisang sumberdaya air dimana tugas tersebut untuk menyiapkan bahan dalam rangka memecahkan maslah ini namun sudah bertahun tahun pantai muntai ini belum mendapatkan penanganan yang serius.

Dan juga diperlukannya menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Sumber Daya Air dengan cara melakukan pembuatan proposal yang bertujuan meminta anggaran untuk proses

pembangunan yang dalam hal ini digunakan untuk mengatasi abrasi dengan cara lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai yang diserahkan kepada kabupaten.

Dikarenakan kabupaten tidak memiliki dana yang cukup tinggi untuk pembangunan tersebut maka proposal ini diserahkan kepada pihak provinsi dengan tujuan mendapatkan bantuan dana dari provinsi.

Hasil wawancara Peneliti dengan ibu Novira, St. Msi (Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air) beliau mengatakan :

*“Sudah banyak proposal yang kami ajukan ke provinsi dan sudah banyak juga ditolak, karena melemahnya perwakilan dari kabupaten diprovinsi khususnya di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi”*( Hari Rabu 3 Oktober 2018 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau). Maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya hubungan daerah dengan provinsi.

f. mengumpulkan, mengklasifikasi, mengelola dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan dalam hal ini dimana saat program mengatasi abrasi yang telah masuk keprovinsi kemudian program tersebut disetujui maka selanjutnya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan pelelangan proyek yang mana dalam hal ini bertujuan agar pembangunan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Dan dalam melakukan pembangunan ini diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan Pengaman pantai ini.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak M.Tazri,ST (Staf Seksi Sungai Pantai dan Danau) :

*“Untuk program mengatasi abrasi ini seperti pengaman pantai, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pembangunan drenase dan gorong-gorong, pembangunan taluk beronjong, pembanguna turap, tanggul dan talud sudah ada diberbagai daerah seperti dipantai selat baru, jangkang dan pantai motong ini sudah dilakukan pembangunan tetapi sering kali cepat rusak dikarenakan kurangnya perawatan.”*

( Pada hari Rabu 3 oktober 2020 di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau)

Maka kesimpulan dari wawancara diatas adalah sudah adanya tindakan nyata yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan ruang Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan tugas dan fungsinya didalam melakukan pembangunan.

G. memantau pelaksanaan program kegiatan unit kerja melalui rapat dan laporan tertulis serta peninjauan dilapangan dan pengawasan didalam pemantauan kinerja ini terdapat standar kegiatan kerja Dinas Pekarajaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah ditetapkan.

h. menilai dana meneloh pelaksanaan pembangunan sarana pengairan unntuk diajjukan kepada atasan laporan yang terakait dengan proses pembangunan fisik diajjukan kepada atasan laporan yang terkait dengan proses pembanguna fisik apakah sudah mencapai yarget yang telah ditentukan atau ada hambatan dalam pengerjaan proyek pembangunan fisik.

Petugas pengawas jika melakukan pengawasan harus mengadakan laporan rutin agar pengerjaan proyek pembnagunan fisik, kemudian penilaian mengenai kualitas pengerjan proyek pembangunan fisik, kemudian penilain mengenai

kualitas pengerjaan proyek pembanguna fisik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanag beserta pengawas terkait, turun langsung untuk melihat perkembangan pengerjaan proyek sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang baik.

Hasil wawancara dengan ibu Novira, St. Msi (Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air)

*“Untuk mendapatkan kualitas baik maka diperlukan anggaran yang cukup besar untuk mendapatkan kualitas terbaik. Anggaran yang diperlukan cukup besar untuk mendapatkan kualitas terbaik sekitar Rp26.000.000 permeter itu merupakan anggaran yang besar sekali sedangkan lajua barasi sangaat cepat dan panjangnya sudah puluhan kilo meter, bahkan bisa puluhan hingga ratusan triliun untuk membangun pengaman pantai didaerah muntai ini bahkan setiap tahunya biaya ini bisa bertambah mahal. Maka diperlukan bantuan dari provinsi dan juga pemerintah pusat karna dilihat dari anggaran kita yang tidak mencukupi.”* ( pada hari Rabu 3 Oktober 2018 di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi)

Maka dapat dilihat bahwa pengaman pantai yangdibangun dengan tujuan yaitu kualitas yang baik dan bermutu, dalam kenyataannya peneliti menemukan adanya masalah di pembangunan turap yang ada di pantai muntai ini karena bangunan turap yang dibangun dikawasan pos tni angkatan laut yang berada dipantai muntai ini yang dibangun sekitar 7 tahun yang lalu sudah hancur diterjang ombak, sehingga diperlukan pengawasan dan perawatan terhadap pembangunan turap supaya hal ini tidak terjadi lagi karena dampak yang

ditimbulkan adalah kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah sendiri yang menyiapkan anggaran kembali untuk membangun ulang lagi turap tersebut.

j. melaksanakan kordinasi dan konsultasi dengan instansi atau dinas terkait dan dengan lembaga lainnya dalam rangka pembangunan sarana pengaairan, dalam melakukan pembangunan turap dalam mengatsi abrasi ini, dinas pekerjaan umum melakukan kerja sama dengan pihak swasta yaitu pihak yang menangani proyek pembangunan pengaman pantai tersebut dan dinas kehutanan untuk penanaman tumbuhan yang bisa membantu mencegah abrasi ini.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sumberdaya air tentang langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk melakukan pekerjaan yang apa bila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.

Maka apa bila memang terjadi kelalaian atau kesalahan akan segera dilakukan tindakan perbaikan bertahap dalam melakukan tindakan perbaikan ini yaitu memberikan sanksi atau teguran, dan menambah jumlah pengawasan.

k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi sungai dan danau berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan.

Selanjutnya laporan yang terkait dengan peroses pembangunan fisik apakah sudah mencapai target yang ditentukan atau ada hambatan dalam pengerjaan proyek pembangunannya, dan petugas pengawas jika melakukan pengawasan harus mengadakan laporan rutin agar pengerjaan proyek pembangunan tidak jauh dari standar pelaksanaan proyek pembangunan yang telah

ditetapkan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan apabila ada kerusakan bisa langsung ditangani agar tidak semakin rusak.

1. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air secara lisan maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air dalam hal ini bisa diberikan apabila memang ada masalah yang harus diselesaikan dengan secepat mungkin.

Pembangunan sangat diperlukan untuk mengatasi abrasi supaya tidak meluas, pembangunan ini masuk kedalam program pembangunan pengamanan pantai yang berisikan tentang pembangunan konstruksi batu pecah stepic/tanggul/dan turap sebagai penahan dan pemecah gelombang.

## **2. Perbaikan**

Didalam seksi sungai pantai dan danau terjadi kekosongan sehingga wawancara dan informasi yang dimiliki terbatas, dalam hal ini untuk mengatasi abrasi diperlukan pengelolaan supaya suatu program bisa berjalan dengan dan pengelolaan dengan melibatkan peran masyarakat didalamnya. Usaha masyarakat setempat meletakkan batang pohon kelapa dipinggir lahan mereka untuk mengurangi dampak gelombang merupakan alternatif dari masyarakat itu sendiri mengingat abrasi yang terjadi sudah sangat parah karena sudah ratusan meter kebun warga yang amblas kelaut. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dengan masyarakat setempat. Maka diperlukannya pengelolaan dalam membantu masyarakat mengatasi masalah abrasi ini.

Tetapi dalam kenyataannya, didalam struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini terdapat beberapa kekosongan jabatan seperti di

seksi sumber daya air dan beberpa lainnya bahkan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ini dijabat oleh PLT hal ini disebabkan seringnya pejabat dilingkungan) beliau mengatakan :

Wawancara dengan Ibu Novrina ( Warga Desa Teluk)

*“ kami meminta perhatian yang serius ke desa muntai kami ini terutama didaerah pinngir pantai muntai ini, kami yang tinggal dekat tepi pantai disini sangat susah dengan air bersih akibat jarak rumah kelaut yang begitu dekat akibat abrasi, dan juga masih cemas juga untuk tinggal disini karena kalau musim utara gelombang sangat besar dan kuat.”* (hari Minggu 7Februari 2020 dirumah narsumber pinggiran pantai Motong, 11:00 wib)

Berdasarkan wawancara peenlitian dengan salah satu masyarakat yaitu ibuk tuti asnah ini yang keberadaan rumahnya sekitar lebih kurang 50 meter dari bibir pantai yang terkena abrasi ini harusnya menjadi perhatian pemerintah, mengingat dalam sebuah perencanaan dari setiap tugas dan fungsi yang dimiliki pemerintah dimana melakukan tinjauan langsung kelapaangan namun maslah ini masih belum bisa teratasi seharusnya pemerintahkan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari abrasi ini sehingga perencanaan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumberdaya air ini tidak hanya dengan melakukanpembangunan pengamanan pantai saja tetapi juga usaha lain untuk melindungi masyarakat.

Dan selanjutnya :

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Tengku (ketua RT 03 RW 02) beliau mengatakan:

*“ didesa kami ini memang sudah banyak beberapa rumah dan ratusan meter tanah dan kebun warga yang amblas kelaut, kalau untuk pindah, sudah banyak warga yang pindah , itupun bagi mereka yang punya tanah selain di tepian pantai ini dan bagi mereka yang tidak punya tanah lain mereka tetap bertahan tinggal disitu, maka dari itu pemerintah harus segera memberikan bangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terimbas dari abrasi ini, saya dan masrakat serta perangkat desa sudah berupa melakukan upaya penanaman bakau namun arus gelombang yang kuat tersebut sering gagal, kemarin kami juga melakukan penanaman dengan dinas kehutanan penanaman 1000 pohon tetapi ya masih tetap belum berhasil dan dirasa kurangnya perhatian kembali dari dinas lingkungan hidup.”*

(Hari sabtu 6 Oktober 2020 didesa motong)

Maka dapat disimpulkan bahwa, sudah ada gerakan inisiatif warga dalam melakukan pencegahan abrasi juga keaktifan dari dinas kehutanan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat maka dari itu, diperlukannya usaha dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ini untuk melakukan program rumah layak huni bagi masyarakat yang menerima dampak dari abrasi ini. Kemudian dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut :

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Novira, St. Msi (Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air)

*“ untuk masyarakat yang terkena dampak abrasi ini kami mempunyai program rumah layak huni yang mana program rumah layak huni yang mana program ini tidak bisa diberikan kepada secara keseluruhan mengingat yang merasakan*

*dampak abrasi sudah lumayan banyak.”( hari rabu 3 oktober 2020 dikantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau pukul 09:00 WIB)*

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa kepala keluarga yang masih bertahan di rumahnya yang sudah hampir terkena abrasi akrena belum mendapatkan bantuan dari pemerintah akan rumah layak huni tersebut.

### 3. Pencegahan

Seksi Sungai pantai dan danau juga memliki tugas pengendalian yaitu menyiapkan bimbingan, pedoman dan kebijakan sertapetunjuk teknnis dibidang Seksi sungai pantai dan danau menegnai penegendalian bencana yang meliputi sungai pantai dan danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Sungai Pantai dan Danau seputar program Pengendalian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini dilakukan dengan menunjuk staf yang diberikan tugas untuk mendapatkan informasi dan data yang akuraat unruk mengatasi masalah yang ada sehingga mendapatkan informasi dan data yanga kurat untuk mengatasi masalah yanga da sehingga dapat diselesaikan dengan semkasimal mungkin sehingga maslah kedepannya bisa diantisipasi.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Suangai,Pantai dan danau.

Hal ini bertujuan agar didalam melaksanakan kegiatan dan melakukan perencanaan hingga pengevaluasian sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum.

- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemastikan dan mengelola data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sungai Pantai dan danau sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.

Hal ini dimana program pengendalian ini bertujuan untuk meminimalisirkan masalah yang ada, didalam pengendalian masalah abrasi ini, pengendalian ssangat diperlukan mengingat dari tahun ke tahun wilayah pesisir kabupaten bengkalis mengalami kerusakan yang cukup arah, terutama yang berharap langsung dengan selat malaka yang memiliki karakteristik gelombang laut yang cukup kuat.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mufriadi, ST ( Staf Bidang Sumber Daya Air) beliau mengatakn:

*“untuk program pengendalaian ini, yaitu pengendalian maslah abrasi ini dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan Seksi Perencanaa dan mengawasi pembangunan”*( hari rabu 18 oktober 2020 dikantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau )

Maka dapat dilihat bahwa dilakukan pengawasan terhadap kinerja dinas dalam melaksanakan program yang ada aakah sudah berhasil atau malah sebaliknya, juga ada kerja sama yang dilakukan oleh masing-masing seksi dalam Bidang Sumber Daya Air untuk mewujudkan pembangunan dalam mengatasi abrasi.

- d. Menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Sungai Pantai dan Danau serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.

Untuk itu dalam hal ini dilakukan oleh Bidang Sumber Daya Air untuk mengatasi masalah dengan mengumpulkan data yang ada kemudian dianalisis untuk diajukan didalam proposal bidang Sumber Daya Air dalam bentuk masalah pengendalian.

- e. Menyiakan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Sumber Daya Air. Sehingga adapun tujuan hal ini yaitu bertujuan agar kebijakan yang dibuat lebih terarah.
- f. Mengumpulkan, mengklarifikasi, mengelola dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Sungai pantai dan Danau sebagai pedoman pemecahan masalah.

Untuk itu dilakukan dengan memulai sebuah program yang ada, kemudian dilakukan pembangunan didalamnya, selanjutnya bukan hanya dengan melakukan penanaman pohon saja, tetapi juga perlu adanya pengendalian terhadap masyarakatnya diakarenakan abrasi yang terjadi bukan hanyamerusak alam tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di tepi pantai.

- g. Memantau pelaksanaan perogram kegiatan unit kerja melalui rapat dan laporan tertulis serta meninjau lapangan dalam Bidang Sumber Daya Air untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya.
- h. Menilai dan menelaah pelaksanaan pengendalian sarana pengairan untuk diajukan keada atasan apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan

atau ada hambatan dalam pengerjaan peroyek pembangunan fisik dalam pengendalian.

- i. Petugas pengawasan jika melakukan pengawasan harus mengadakan pelaporan rutin agar pengerjaan proyek pembangunan tidak jauh dari standar pelaksanaan proyek pembangunan, kemudian penilaian mengenai kualitas pengerjaan proyek pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta pengawas terkait, turun langsung untuk mendapatkan hasil yang baik maka ada pengendalian yang baik untuk mengawasi setiap kinerja dinas berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis maupun dalam pengerjaan proyek yang ada.

#### 4. Pemeliharaan

Pemeliharaan sangat dibutuhkan didalam sosialisasi kemasyarakatan mengingat abrasi semakin meluas dan terjadinya penebangan hutan bakau secara ilegal, sehingga terjadinya ketidak seimbangan ekosistem disaerah antai yang terkena abrasi.

Hasil wawancara eneliti denag bapak M.Tazri,ST ( Staf Seksi Sungai Pantai dan Danau)

*“program pemeliharaan bangunan pengaman pantai sebenarnya sudah termasuk dalam program kami, tetapi masalahnya tetap sama masih tentang anggaran dan juga sumber daya manusiannya dan juga jarak dan kondisi jalan menuju kedesa muntai juga termauk susah karena jalan disana rusak berat.tetapi*

*kami terus berupaya selalu memantau kondisi dilapangan”.*( hari rabu 6 oktober 2020 dikantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau)

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Tazri tersebut maka dapat dilihat bahwa adanya program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut dalam melakukan pemeliharaan bangunan pengaman pantai sudah berupaya untuk melakukan Pemeliharaan tetapi terkendala oleh Anggaran yang minim sehingga banyak bangunan pengaman Pantai yang telah dibangun Menjadi rusak Kembali.

#### Hasil Wawancara

No	Nama	Jabatan	Keyforman / Informan	Tanggal	Keterangan
1	Novira, ST.,M.Si	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air	Keyforman	3-Okt-20	Tidak ada data tentang berapa kilometer garis abrasi dari pantai kedaratan, kalau dari kami (dinas) tidak mengukur jarak abrasi yang sangat luas itu tapi kalau untuk panjang garis abrasi yang terjadi sudah ratusan meter yang ambruk kelaut.
2	Anto	Nelayan	Informan	6-Sep-20	Saya sudah seumur hidup tinggal di desa ini, namun sampai saat ini belum ada pembangunan yang efektif didaerah ini bahkan kebun saya dan warga disini sudah ratusan meter yang jatuh kelaut, bahkan dipantai adalah kebun karet dan kelapa milik masyarakat yang tinggal didekat sini bahkan kebun kelapa milik saya yang dipinggir pantai sudah 200an meter yang sudah habis.Kalau untuk penanaman phon bakau juga dirasa belum maksimal masih setengah hati cuman ada acara tertentu atau ada pejabat saja baru ada penanaman bibit bakau dan hanya sesekali saja ada orang dinas datang memantau.
3	M. Tazri, ST	Staff Seksi Sungai, Pantai dan Danau	Informan	3-Okt-20	Untuk program mengatasi abrasi ini seperti pengaman pantai, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya,pembangunan drenase dan gorong-gorong,

					pembangunan taluk beronjong, pembangunan turap, tanggul dan talud sudah ada diberbagai daerah seperti dipantai selat baru, jangkang dan pantai motong ini sudah dilakukan pembangunan tetapi sering kali cepat rusak dikarenakan kurangnya perawatan.
4	Novrina	Warga Desa Teluk	Informan	7-Feb-21	Kami meminta perhatian yang serius ke desa muntai kami ini terutama didaerah pinggir pantai muntai ini, kami yang tinggal dekat tepi pantai disini sangat susah dengan air bersih akibat jarak rumah kelaut yang begitu dekat akibat abrasi, dan juga masih cemas untuk tinggal disini karena kalau musim utara gelombang sangat besar dan kuat.
5	Tengku	Ketua RT.03 RW.02 Desa Motong	Informan	6-Okt-20	Didesa kami ini memang sudah banyak rumah dan ratusan meter tanah dan kebun warga yang amblas kelaut, kalau untuk pindah, sudah banyak warga yang pindah, itupu bagi mereka yang punya tanah selain ditepian pantai ini dan bagi mereka yang tidak punya tanah lain mereka tetap bertahan tinggal disitu, maka dari itu pemerintah harus segera memberikan bangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terimbas dari abrasi ini, saya dan masyarakat serta perangkat desa sudah berupaya melakukan upaya penanaman bakau namun arus gelombang yang kuat membuat hal itu gagal, kemarin kami juga melakukan penanama dengan dinas kehutanan, penanaman 1000 pohon tetapi ya masih tetap belum berhasil dan dirasa kurangnya perhatian kembali dari dinas lingkungan hidup.
6	Mufriadi, ST	Staff Bidang Sumber Daya Air	Informan	18-Ot-20	Untuk program pengendalian ini, yaitu pengendalian masalah abrasi ini dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan seksi perencanaan dan mengawasi pembangunan.
7	M. Tazri, ST	Staff Seksi Sungai, Pantai dan Danau	Informan	6-Okt-20	Proram pemeliharaan bangunan pengaman pantai sebenarnya sudah termasuk dalam program kami, tetapi masalahnya tetap sama masih tentang anggaran dan juga sumber daya manusianya dan juga jarak

					dan kondisi jalan menuju kedesa muntai juga termasuk susah karena jalan Tetapi kami harus berupaya selalu memantau kondisi dilapangan.
--	--	--	--	--	--

### **C. Hambatan-hambatan Yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mengatasi Abrasi**

Adapun hambatan yang terdapat dalam mengatasi masalah abrasi ini yaitu:

Hasil wawancara Peneliti dengan ibu Novira, St. Msi (Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air)

*“Kalau Hambatan ya masalah anggaran sudah sangat jelas, karna apa bila ada anggaran Pembanguna akan dapat segera dilakukan, kita masih membutuhkan banyak dana dari Provinsi dan Pusat karna dari dana daerah kita sendiri cukup minim diberikan Untuk menanggulangi Masalah abrasi ini, bahkan untuk Tahun 2019 Ini tidak ada lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Diseluruh daerah Kabupaten Meranti ini. Maka yang hanya kami harapkan juga ada Peran aktif masyarakat dan dinas Kehutanan Untuk menanam Pohon Mangrove agar bisa mengurangi laju abrasi.”(hari rabu 6 oktober 2020 Dikantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Pukul 09:00 WIB)*

Maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan masalah paling Utama dan sangat penting bagi pembangunan pengaman pantai ini. Anggaran yang terbatas dan minim untuk membangun pengaman pantai ini dikarenakan biayanya sangat mahal yakni Rp 26.000.000/meter bahkan setiap tahunnya pasti mengalami

kenaikan. Diperlukannya bantuan dari pemerintah provinsi dan Pusat untuk menanggulangi masalah abrasi ini ketahap yang serius.

Sedangkan didalam kenyataannya peneliti menemukan hambatan yang bukan hanya dari anggaran saja yang disebutkan oleh responden diatas, namun dari segi melakukan pembangunan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan terdapat hambatan lain yakni:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pertama yang mempengaruhi penghambatan pembangunan dan perbaikan fisik di kabupaten meranti, artinya dilihat dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keahliannya yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pekerjaan, karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pembangunan dan perbaikan fisik di pantai motong ini.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Kualitas pegawai yang ada masih kurang, dengan kata lain Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau harus dapat meningkatkan kualitas para pegawai yang ada, agar dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar, karena kualitas pegawai dapat berpengaruh terhadap

peroses pencegahan,pembangunan,perbaikan dan pemeliharaan daya rusak air yang da di kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Fasilitas (Sarana dan prasarana)

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan peroses kegiatan, baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dinas pekerjaan Umum Provinsi Riau juga sangat memerlukan fasilitas yang lengkap guna menjalankan tugas-tugas pemerintah agar tercapai dengan yang telah direncanakan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan Baik dan lancar.

c. Anggaran

Hal ini merupakan permasalahan yang paling utama. Dikarenakan untuk proses abrasi memerlukan dana yang cukup besar. Keterbatasan anggaran adalah hambatan yang paling dominan. Mengingat memakan dana yang cukup besar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau masih belum bisa untuk menindak lanjuti proses abrasi tersebut. Namun, terkat hal itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau masih terus mengupayakan untuk anggaran kepada pemerintah pusat.

d. Kurangnya peran aktif masyarakat

Dalam kegiatan mengatasi proses abrasi tersebut, tidak hanya pemerintah saja yang turut andil, tetapi diharapkan masyarakat juga

ikut serta. Karena keterbatasan sumber daya manusia di kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau perlu adanya tambahan tenaga dukungan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan hasil maksimal. Selain itu, dengan turut berperannya masyarakat secara tidak langsung memberikan antisipasi kepada masyarakat pentingnya mengatasi abrasi serta manfaat dari abrasi itu sendiri bagi masyarakat.

e. Kerja sama dengan pihak terkait

Untuk mengatasi abrasi tersebut, tidak hanya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau saja yang memegang peran penting. Namun, beberapa pihak terkait juga menjadi tolak ukur lancarnya proses untuk mengatasi abrasi tersebut. Salah satunya adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, untuk turut mendukung pekerjaan ini dengan melakukan penanaman pohon mangrove. Tentunya dengan adanya penanaman pohon ini, selain memberikan dampak pelestarian lingkungan, juga mampu menjadi jembatan pengurangan abrasi secara alami. Untuk itu, perlu adanya kerja sama dengan pihak terkait demi kelancaran proses untuk mengatasi abrasi tersebut.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka upaya pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni :

1. Berdasarkan indikator Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau sudah pernah Melakukan Pembangun Pengaman Pantai Ini yakni bangunan turap tetapi karena kurangnya pengawasan serta anggaran Bangunan turap ini kembali hancur, dan juga dilihat dari anggaran yang tidak jelas dan seringkali masalah abrasi ini tidak menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Riau sehingga lanjutan proyek Pembanguana Pengaman Pantai ini sangat lamban bisa hingga bertahun tahun huingga belasan tahun baru kembali adanya lanjutan pembangunan pengaman pantai. Pemerintah dalam Hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau juga Sudah melakukan Pembangun Rumah Layak Huni bagi beberapa masyarakat yang rumahnya terkena dampak Abrasi ini.
2. Berdasarkan Indikator Perbaikan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau sangat jarang datang untuk meliht kondisi bangunan yang ada dan juga anggaran yang tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan sehingga sering kali banguna yang sudah ada menjadi rusak kembali tidak sempat untuk dilakukan tindakan perbaikan.

3. Berdasarkan Indikator Pencegahan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau juga dirasa belum optimal dalam menjalankan tugasnya dalam hal pencegahan, kurangnya pengawasan terhadap wilayah serta bangunan yang ada sering kali membuat bangunan yang ada cepat hancur kembali karena ganasnya ombak serta tidak adanya perbaikan terhadap kerusakan bangunan pengaman pantai tersebut. Dan juga dilihat belum melakukan kordinasi terhadap instansi lain untuk mencegah meluasnya abrasi ini.
4. Berdasarkan indikator pemeliharaan, Dinas pekerjaan Umum Provinsi Riau dirasa kurang optimal dalam menjalankan tugasnya tersebut, dilihat dari tidak adanya perbaikan terhadap bangunan yang sudah ada sehingga bangunan menjadi rusak kembali.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan dinas pekerjaan umum provinsi riau dalam mengatasi abrasi peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Diharapkan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan kajian tentang luasnya abrasi sehingga mendapatkan data yang akurat berkaitan tentang luas panjang abrasi sehingga memudahkan dalam mengatasi abrasi ini saat ingin melakukan pembanguna pengaman pantai, dan juga diharapkan masalah abrasi ini termasuk menjadi prioritas pemerintah Provinsi Riau dapat Memasukan Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Setiap tahunya dan juga mengoptimalkan anggaran di bidang pembangunan pengaman pantai ini.

2. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air untuk senantiasa Menugaskan Anggotanya untuk Sering Melakukan pengawasan Kewilayah ini sehingga bisa tau bagaimana kondisi bangunan dan kondisi pantai secepatnya. Sehingga bila terjadi kerusakan terhadap bangunan pengaman pantai dapat dilakukan segera tindakan perbaikan sebelum kerusakannya menjadi lebih parah, dan juga diharapkan dinas menysihkan anggaran juga dalam hal perbaikan dan perawatan bangunan pengaman pantai.
3. Dalam hal pencegahan diharapkan staf atau anggota dari dinas pekerjaan umum provinsi riau Untuk dapat insentif melakukan pengecekan dilapangan sehingga dapat dilaporkan selalu kondisi dilapangan. Dan juga diharapkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar dapat berkordinasi kepada instansi lain contohnya dinas kehutanan dan dinas lingkungan hidup serta dinas lainnya yang juga memiliki tanggung jawab terhadap masalah abrasi ini sehingga dapat melakukan upaya upaya untuk mencegah abrasi menjadi lebih parah lagi seperti melakukan penanaman mangrove besar besaran dan juga sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya abrasi.
4. Dalam hal pemeliharaan Diharapkan kepada dinas pekerjaan umum dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air untuk senantiasa melakukan pengamatan dilapangan sehingga keadaan bangunan pantai yang sudah ada dapat tercegah dengan baik.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, CV, Alfabeta
- Kodoate, Robert J & Roesstam sjarif 2010. *Tata Ruang Air*. PT Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhun. 2011. *Kybernologi (Pemerintahan Baru I)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhun, 2011. *Kybernologi (Pemerintahan Baru II)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Iskandar. 2008. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Ciputan
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pmerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Pramudita, F. 2007. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Yudisthira
- Sangadji, Etta. Mamang, Sopiah. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI
- Soenarko, H. 2003. *Public Policy*. Surabaya; Airlangga University.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hamdi, Mukhlis 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan* . Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset

Winarno, Budi. 2006. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta:Penerbit:Gramedia Pustaka Utama.

Sorhardono, 2004. *Perlakuan Masyarakat Modern*, Jakarta, Elexmedia.

Abdul Wahab, Soliehin, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

A.M. Kadarman et al, *Ilmu Pemerintahan*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Darmadi, Hamid, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung:Alfabeta.

Nuwawi, Hadari, 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Kansil, CST dan Chiritine, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia* : Bumi Aksara, Jakarta.

Awang, Azam & Wijaya Mendara, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau.

Moekijat, 2005. *Pengembangan Organisasi*. Cekatan Ketujuh, Bandung, Mandar Maju.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau bagian keempat Bidang Sumber Daya Air pasal 20.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Data Pengamanan Pantai Kabupaten Kepulauan Meranti.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 2013. Fisipol UIR.